

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Maluku Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, dimana sebelumnya adalah termasuk wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Terbentuknya Kota Tidore Kepulauan memiliki latar belakang yang panjang, tetapi yang paling utama adalah : (1) sebagai bekas pusat kekuasaan Kesultanan Tidore pada masa lalu hingga kini; dan (2) sebagai bekas Ibukota Perjuangan Propinsi Irian Barat (3) terdapat kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Kota Tidore Kepulauan masih tergolong daerah yang belum berkembang hal ini disebabkan ketertinggalan dan keterisolasian sebagai akibat dari minimnya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi kekayaan sumberdaya alamnya, yang jika dikelola secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Masalahnya adalah arah dan kebijakan pembangunan selama ini tidak berdasarkan pertimbangan karakteristik wilayah. Penyeragaman kebijakan pembangunan nasional di masa lalu telah berimplikasi terhadap perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan negara, termasuk daerah Kota Tidore Kepulauan. Keberpihakan pembangunan pada masa lalu hanya berada di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi

tertentu, sementara daerah-daerah penyanggah (*hinterland*) kurang mendapat perhatian. Implikasi kebijakan pembangunan nasional di masa lalu tersebut harus segera di orientasikan dengan pendekatan pembangunan berorientasi kewilayahan, yaitu pemetaan terhadap wilayah-wilayah potensial yang harus dikembangkan berdasarkan potensi wilayahnya yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonominya.

Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan sangat berdekatan dengan wilayah Kota Ternate. Hal ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap Kota Ternate menjadi dominan. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan ke depan adalah kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan.

Beberapa pertimbangan penting dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Tidore Kepulauan pada kurun waktu 20 Tahun ke depan adalah aspek kebudayaan, pemerintahan, pelayanan jasa-jasa dan pariwisata. Disamping itu, aspek pendukung yang menjadi skala prioritas adalah ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi yang akan memicu dan memacu percepatan pembangunan daerah serta mendorong tingkat produktivitas maupun mobilitas sosial ekonomi masyarakat.

Aspek-aspek strategis tersebut akan dijabarkan di dalam RPJP dan menjadi acuan bagi penyusunan program lima tahunan (RPJM) oleh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD. Tujuan konsepsional RPJP ini adalah agar pembangunan Kota Tidore Kepulauan dalam kurun waktu 20 Tahun ke depan memiliki *blueprint* yang sistematis, komprehensif, terintegrasi

dan terarah dalam mencapai tujuan RPJP Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan Provinsi Maluku Utara dan tujuan pembangunan Nasional.

Berdasarkan pemikiran diatas serta mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore Kepulauan sepakat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025. RPJP Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah makro dua puluh tahun dan memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Dokumen RPJP ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Tidore Kepulauan lima tahunan dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

B. SISTEMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi Umum dan Permasalahan Daerah

BAB III : Visi, Misi dan Indikator Kinerja

BAB IV : Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan
Jangka Panjang

BAB V : Kaidah Pelaksanaan

BAB VI : Penutup

C. KETERKAITAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

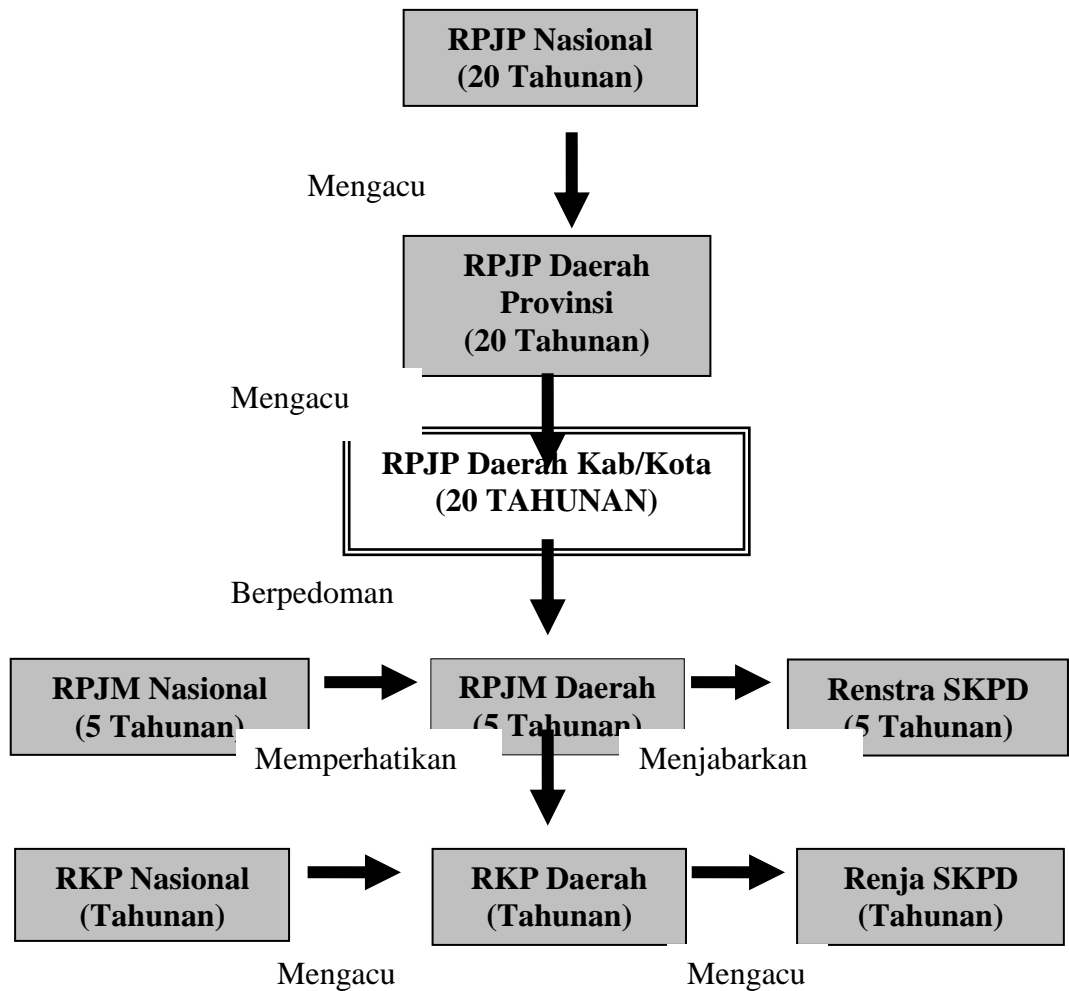
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen rencana jangka panjang 20 Tahun yang berisikan, kondisi umum, visi misi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang. Sedangkan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) disesuaikan dengan masa waktu Kepala Daerah terpilih, yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah.

RPJPD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kota Tidore Kepulauan dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kota Tidore Kepulauan. RPJPD Kota Tidore Kepulauan ini disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Maluku Utara yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi segenap pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat) guna menumbuhkan keserasian dalam pembangunan.

Sebagai penjabaran RPJMD, Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), diharuskan menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) berisikan gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Renstra SKPD, dijabarkan untuk program tahunan yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan. Renja-SKPD yang telah disusun, dirangkum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisikan prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Adapun keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dilihat pada bagan berikut :



BAB II KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN DAERAH

A KONDISI UMUM

Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Wilayah Kota Tidore Kepulauan berada di daerah pesisir barat pulau Halmahera.

Batas administratif wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah sebelah utara terdapat Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate. Sebelah barat berbatasan dengan laut Maluku. Sebelah timur berbatasan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Untuk memberikan gambaran secara umum terhadap kinerja pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan dari berbagai aspek, disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dengan mengacu pada perkembangan hasil-hasil pembangunan yang dicapai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut :

1. Sosial Budaya

Pembangunan pada bidang sosial budaya sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin melalui indikator kuantitas dan kualitas

kesejahteraan sosial yang merupakan kontribusi berbagai bidang, meliputi :

a. Kependudukan

Di bidang kependudukan, upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk terus ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Terdapat peningkatan jumlah penduduk, namun umumnya lebih dipengaruhi migrasi dari luar yang menempati Kelurahan/Desa di Kecamatan Tidore, dan dataran Kecamatan Oba, Oba Utara dan Oba Selatan. Berdasarkan hasil sensus, survey, dan registrasi penduduk di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2004 sebanyak 82.053 jiwa atau rata-rata tumbuh 2,43% yang terdiri dari laki-laki 41.488 jiwa (50,56%) dan perempuan 40.565 jiwa (49,44%). Jika dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami pertumbuhan 91.930 jiwa (3,01%) yang terdiri dari laki-laki 45.413 jiwa (49,39%) dan perempuan 46.517 (50,61%). Konsentrasi dan penyebaran penduduk terbanyak adalah di wilayah pulau Tidore 52.055 (56,62%). dengan kepadatan rata-rata 422 jiwa/Km² dan terkecil berada di wilayah jasih Oba dengan tingkat kepadatan penduduk 24 jiwa/Km². dengan demikian tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kota Tidore Kepulauan rata-rata 59 jiw/ Km².

Dari jumlah penyebaran penduduk diatas sebesar 59.898 jiwa (91%) yang telah memiliki Kartu Penduduk dan memiliki Akta Kelahiran sebanyak 65.947 jiwa perseribu adalah 65,95%. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tidore Kepulauan di dominasi oleh migrasi

penduduk antar daerah yang datang ke wilayah ini, terutama dari wilayah Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Jadi pertumbuhan penduduk lebih disebabkan oleh faktor migrasi, bila dibanding pertambahan secara alami (*natural increase*). Namun demikian masih tingginya angka kematian karena rendahnya kualitas hidup masyarakat. Kematian kasar tahun 2004 di Kota Tidore Kepulauan adalah 0,52% atau 432 persatuan penduduk. Seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik, maka pada tahun 2008 angka kematian kasar menurun menjadi 0,37% atau 338 persatuan penduduk. Upaya-upaya yang sedang, akan dan telah dilakukan dalam pembangunan kependudukan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk terutama di daerah-daerah yang masih rendahnya tingkat kesejahteraan untuk mendorong kehidupan yang lebih layak agar tingkat kematian penduduk dapat ditekan. Sebagai perbandingan berdasarkan Kajian Makro Ekonomi Tahun 2008 angka kematian bayi tahun 2008 adalah 12 jiwa perseribu kelahiran, mengalami penurunan 14,85% jika dibandingkan dengan tahun 2004 adalah 45 jiwa perseribu kelahiran.

b. Pendidikan

Jumlah penduduk usia sekolah di Kota Tidore Kepulauan sampai dengan tahun 2004 adalah 29.045 dengan guru tetap sebanyak 1.611 guru, meningkat menjadi 30.980 pada tahun 2008 (19,35%) dengan jumlah guru tetap 1.998 meningkat (3,87%), dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 adalah 1.529 guru

(76,53%). Sedangkan jumlah sarana dan prasarana sekolah untuk semua tingkatan pendidikan sampai dengan tahun 2008 adalah 228 unit, yang terdiri dari TK 54 unit, SD/MI 108 unit, SLTP/MTs 40 unit, SLTA/MA 24 unit dan Perguruan Tinggi 2 unit. Sarana pendidikan di Kota Tidore Kepulauan relatif memadai karena tersedianya fasilitas gedung mulai dari jenjang pra sekolah, wajib belajar 9 tahun sampai dengan SLTA dan Perguruan Tinggi.

Pelayanan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan selama ini berjalan cukup efektif, hal mana dapat dilihat dari akumulasi siswa dari berbagai jenjang pendidikan dari tingkat SD samapai dengan SLTA adalah sebanyak 27.720 siswa, dengan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) sampai dengan tahun 2008 untuk tingkat SD/MI/Paket A adalah 15.745 siswa (88,56%), APM tingkat SLTP/MTs/Paket B adalah 6.543 siswa (90,72%) dan APM tingkat SLTA/MA/Paket C adalah 5.342 siswa (89,22%). Dengan demikian akumulasi Angka Putus Sekolah (APS) hingga tahun 2008 adalah 90 siswa (0,3%). Dengan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tidore Kepulauan tahun 2008 baru mencapai 8,3 tahun. Sementara angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2004 sebesar 93,12% mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 96,80%.

Adanya perbaikan di bidang pendidikan merupakan kontribusi positif dari pemerintah daerah, terutama peningkatan alokasi pembiayaan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Meskipun demikian masih terdapat

ketimpangan kualitas pendidikan terutama adanya kesenjangan yang cukup besar antar wilayah akibat geografi dan isolasi daerah.

c. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dapat diketahui melalui peningkatan umur harapan hidup. Pada tahun 2004 tingkat harapan hidup di Kota Tidore Kepulauan 63,9 Tahun dan Tahun 2008 meningkat menjadi 64,5 tahun. Adanya tingkat harapan hidup yang semakin baik mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun demikian indikator status kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi, balita dan ibu masih memprihatinkan. Kondisi ini tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi sebesar 24% perseribu kelahiran hidup pada tahun 2004 jika dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami penurunan 4% menjadi 20% perseribu kelahiran hidup. Selanjutnya angka kematian Ibu pun masih tinggi yaitu 444 perseratus ribu kelahiran. Kondisi kesehatan masyarakat diperburuk lagi dengan adanya disparitas yang relatif melebar antar wilayah, tingkat sosial, ekonomi, dan gender. Kondisi ini tercermin dengan tingginya penyakit malaria, Ispa, Diare dan penyakit menular lainnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar diseruluh wilayah Kecamatan diantaranya : jumlah Posyandu 112 unit di tahun 2004 meningkat menjadi 128 unit (12,50%) pada Tahun 2008,

Pustu/Poliklinik/Puskesmas Tahun 2004 sebanyak 32 unit meningkat pada Tahun 2008 sebanyak 36 unit (8,78%), dan di dukung 1 unit Rumah Sakit Daerah. Dukungan tenaga medis tahun 2004 sebanyak 109 orang meningkat menjadi 173 orang (58,71%). Dengan demikian ratio Pustu/ Poliklinik/ Puskesmas persatuan penduduk pada Tahun 2008 adalah 1,18% dan ratio tenaga medis persatuan penduduk tahun 2008 adalah 1,88%, demikian pula dengan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin hingga tahun 2008 adalah 84,40%, cakupan balita gizi buruk 86,84% dan cakupan kunjungan bayi 87,46%. Namun demikian komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif pada Tahun 2008 masih relatif rendah 45,13%.

d. Perempuan dan Anak

Kualitas hidup perempuan dan anak dapat dilihat dari indikator rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2004 sebanyak 1.450 orang meningkat tahun 2008 menjadi 1.774 orang (14%). Angka partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2004 sebanyak 5.850 Meningkatkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 6.631 orang (11,78%). Angka melek huruf perempuan usia 15 Tahun keatas sampai dengan tahun 2008 adalah 32,61%. Ratio prefalensi peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur sampai dengan tahun 2008 adalah 10.835 jiwa (86,30%), dengan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I hingga tahun 2008 adalah 7.414 jiwa (23%) dari total

jumlah keluarga 19.660 jiwa. Namun kultur atau tradisi yang menjadi tingkah laku hubungan sosial antara lelaki-perempuan yang berlangsung dalam keluarga maupun masyarakat umumnya belum berpihak pada kepentingan kaum perempuan. Selain itu tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap isu gender di masyarakat masih sangat terbatas.

e. Seni Budaya dan Olahraga

Pengaturan sepadan kawasan cagar budaya untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan produktif, sehingga menjamin kelestarian. Oleh karena itu pembangunan fisik sebagai obyek pengembangan taman wisata yang menjadi prioritas untuk dilestarikan dan dibangun adalah:

1. Obyek wisata seni dan budaya, terdiri dari; upacara adat lufu kie dan legu gam serta dabus.
2. Obyek wisata sejarah, terdiri dari; kedaton sultan, mesjid sultan, dermaga sultan, mesium sonyinge malige, makan sultan Nuku, makan sultan Djamaluddin, makan Habib Umar Al Faroek Rahmatullah, dan benteng tahula. Obyek wisata ini diharapkan menjadi ikon pengembangan wisata sejarah Kota Tidore Kepulauan di masa yang akan datang.
3. Obyek wisata alam, terdiri dari; kawasan wisata gurua marasai di Kelurahan Guraping dan air terjun luku celeng di kelurahan Kalaodi.

4. Obyek wisata agro, terdiri dari; kawasan agrowisata Gurabunga dan Kalaodi.

5. Obyek wisata tirta, terdiri dari; kawasan wisata pulau Maitara dan gugusan pulau Woda. Demikian pula wisata bahari lainnya yang terdapat di pantai Rum, Cobo, taman Cobo dan pantai Gamgau.

Sebagai khasanah dalam mendukung kegiatan pariwisata setiap tahun rata-rata dilakukan festival seni dan budaya sebanyak 9 kali dan didukung dengan sarana pagelaran seni dan budaya sebanyak 3 unit.

Untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda, tersedia balai remaja sebanyak 37 unit dengan ratio persatuan penduduk adalah 0,39% dan fasilitas lapangan olah raga sebanyak 107 unit dengan ratio persatuan penduduk adalah 1,14%.

f. Ketenagakerjaan

Tingkat pertumbuhan kesempatan kerja adalah salah satu tujuan pembangunan untuk mengurangi tekanan pengangguran dalam masyarakat. Jumlah angkatan kerja yang bekerja tahun 2004 sebanyak 23.593 orang meningkat menjadi 34.188 orang pada tahun 2008 (11,23%). Dengan semakin membaiknya kondisi kesempatan kerja dapat menekan angka pengangguran terbuka Tahun 2004 sebanyak 4.007 orang (14,00%) menurun menjadi 1.944 orang (5,38%) pada Tahun 2008. Dengan demikian komposisi pengangguran di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 4.697

orang adalah termasuk setengah pengangguran terbuka sebanyak 2.754 orang (7,49%).

g. Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat menunjukkan perbaikan, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya jumlah keluarga yang tergolong pra sejahtera sebesar 7.398 jiwa pada tahun 2004 dibandingkan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 7.014 jiwa (5,15%). Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat marginal termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah suatu kewajiban yang harus diwujudkan. Untuk mendukung upaya pemberdayaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial terdapat potensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga Tahun 2008 masih relatif tinggi 42,96% dari 2.825 PMKS yang ditangani. Disamping itu pula dukungan bantuan kepada PMKS hingga Tahun 2008 sebanyak 1.245 (58,59%).

2. Politik, Keamanan dan Ketertiban

Perkembangan demokrasi sejak reformasi hingga tahun 2008 telah diselenggarakan dua kali pemilihan legislatif dan satu kali pemilihan kepala daerah, sehingga dalam perspektif pembinaan dan pendidikan politik rakyat masih didominasi oleh peran partai politik. Namun untuk menjamin kesinambungan pembangunan diperlukan dukungan keaman dan ketertiban masyarakat secara

kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut hingga tahun 2008, telah tersedia berbagai pranata sosial meliputi: 13 LSM, 22 Ormas, 35 OKP. Disamping itu untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di dukung oleh 30 Personil Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ratio persatuan penduduk adalah 0,03%. Ratio lembaga perlindungan masyarakat persatuan penduduk adalah 0,60% (552 Personil) dengan penyebaran 216 unit poskamling dengan ratio persatuan penduduk adalah 0,23%. Kondisi pranata sosial yang memadai inilah berimplikasi pada tugas-tugas meminimalisir kriminalitas yang terjadi di daerah ini cenderung terus menurun.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak harus di ciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sampai dengan akhir tahun 2008 tercatat ada 84 (50%) dari 126 peristiwa gangguan keamanan yang dilaporkan dan diselesaikan oleh jajaran keamanan.

Pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan di Kota Tidore Kepulauan berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dengan terselenggaranya forum komunikasi antara pemerintah daerah, pimpinan DPRD, tokoh agama dan tokoh adat dalam kesetaraan dan keterbukaan. Selain itu, meningkatnya pengetahuan dan wawasan organisasi kemasyarakatan dalam penyampaian aspirasi sehingga setiap pengambilan keputusan merupakan konsensus dari sebagian besar masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan jaringan jalan sampai dengan tahun 2008 adalah sepanjang 243,38 km yang terdiri dari jalan dihotmix sepanjang 32,90 km, Lapen 78,29 km Sirtu 13,12 km dan jalan tanah sepanjang 43,46 km. Sementara kondisi jalan yang rusak berat sepanjang 71,52 km, rusak sedang sepanjang 22,28 km dan rusak ringan sepanjang 39,19 km

Sarana dan prasarana perhubungan laut tersedia pada lima simpul angkutan laut (Rum, Soasio, Sofifi, Loleo, dan Gita) serta ASDP di Rum dan Dowora. Sedangkan sarana dan prasarana perhubungan darat terdapat pada terminal Rum, Soasio, Sofifi dan Gita. Aktifitas sarana dan prasarana perhubungan ini dapat dilihat dari ratio panjang jalan dan kendaraan umum sampai dengan tahun 2008 adalah 0,27% dan Ratio arus penumpang angkutan umum persatuan penduduk adalah 32,62%

Disamping itu, indikator sarana dan prasarana yang menjadi perhatian dalam pengembangannya adalah penduduk berakses air minum 98,97%, dengan kebutuhan rata-rata perhari 41.138,61 m³. Ratio kawasan kumuh 1,02%, ratio ruang terbuka hijau 30%, dan ratio luas wilayah perkotaan 13,30%.

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung lainnya meliputi; sarana peribadatan sebanyak 268 unit yang terdiri dari; mesjid 108 unit, musallah 110 unit dan gereja 21 unit. Sementara lembaga perbankan 6 Unit, lembaga non bank 12 unit, Kantor Pos 2 unit, kelistrikan PLN

berkapasitas 3.000 KVA, telekomunikasi, hotel 5 unit dan restoran 22 unit.

4. Ekonomi

Indikator ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB per kapita atau Paritas Daya Beli Masyarakat, Inflasi, produktifitas sektor-sektor PDRB, jumlah dan nilai investasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2004 adalah 5,71% jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 5.79%, dengan trend pertumbuhan rata-rata pertahun hingga tahun 2008 adalah 1,7%. Sedangkan pembentukan PDRB perkapita tahun 2004 adalah sebesar 2,51 juta rupiah, meningkat 18,51% jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 3,08 jutaan rupiah.

Demikian pula Laju inflasi pada tahun 2004 tercatat 4,82% dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 196,13 (IHK 2004 =100). Dan tingkat inflasi tahun 2008 sebesar 11,25%. Meskipun tingkat inflasi cenderung meningkat akan tetapi masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai sektor antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan tingkat penangguran serta produksi daerah. Peningkatan inflasi selama tahun 2008 mengalami 11 kali inflasi dan 1 kali deflasi pada bulan Mei sebesar 3,10%, sedangkan laju inflasi awal tahun kalender Januari-Mei sebesar 6,41%. Jika dibandingkan laju inflasi Nasional pada bulan yang sama

adalah relatif rendah 5,35%. Sementara tingkat inflasi terendah pada tahun 2008 terjadi pada bulan Desember sebesar 0,23% dan deflasi pada bulan Oktober sebesar 0,10%. Dengan demikian dilihat dari perkembangan laju inflasi, nampak bahwa perekonomian Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 relatif aman dan stabil.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) investasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah, karena investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan di masa yang akan datang. PMTB/investasi tersebut terkait dengan pembukaan usaha baru maupun pengembangan usaha untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat ataupun untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja meskipun hingga tahun 2008 investasi belum secara positif.

5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) merupakan salah satu daya dukung pembangunan yang relatif besar di wilayah Kota Tidore Kepulauan, namun dalam pemanfaatannya masih sangat terbatas. Hal ini terkait dengan keterbatasan dukungan pembiayaan, penguasaan iptek maupun belum adanya minat di bidang investasi dan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Disamping itu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal hingga tahun 2008 kepada 22 perusahaan wajib Amdal baru mencapai 36,00%, penindakan dan penegakan hukum terhadap lingkungan

dengan 2 kasus telah ditangani 100%. Sedangkan penanganan sampah berdasarkan volume produksi tahun 2008 sebanyak 164 m³ dan telah tertangani 66,37 m³ (40,36%). Komposisi dan ratio tempat pembuangan sampah tahun 2008 sebanyak 252 m³ persatuan penduduk adalah 0,27%.

Untuk memperoleh gambaran potensi SDA dan daya serap hingga tahun 2008 sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian.

Upaya peningkatan sektor pertanian ditujukan pada perluasan lahan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan dimana pada Tahun 2008 luas pertanian 70 ha dengan produksi 140 ton, tanaman perkebunan yang meliputi kelapa 13.861 ha, kakao 2.825 ha, pala 2.524 ha dan cengkeh 2.382 ha dengan rata-rata produksi pertahun 4.839 ton.

Produksi perikanan samapai dengan akhir tahun 2008 sebanyak 13.395,38 ton dengan jumlah sarana perikanan atau alat tangkap sebanyak 1.815 unit sedangkan populasi peternakan terdiri dari ternak sapi sebanyak 4.636 ekor (termasuk milik pemerintah 335 ekor), kambing 3.610 ekor, unggas 70.390 ekor dan itik 808 ekor, sedangkan luas areal hutan mencapai 187.250 ha yang terdiri dari hutan lindung 101.500 ha, hutan produksi terbatas 32.000 ha, hutang produksi 3.750 ha dan hutan konversi seluas 50.000 ha.

b. Sektor Industri

Perkembangan usaha industri kecil dan menengah yang terdaftar hingga tahun 2008 sebanyak 746 unit dengan penyerapan tenaga kerja 2.497 orang. Bila dilihat dari segi nilai investasi maka industri pengolahan kayu, kimia dan bahan bangunan yang menyerap investasi terbesar yaitu 30 milyar rupiah. Sedangkan industri kerajinan barang dan seni menyerap investasi terkecil senilai 209 juta rupiah. Pada tahun 2008 tercatat jumlah pelanggan air bersih mengalami peningkatan menjadi 2.410 pelanggan dengan kebutuhan penggunaan air sebesar 222.350 m³.

c. Sektor Perdagangan

Jumlah pengusaha perdagangan yang terdaftar sebanyak 227 unit yang terdiri dari perdagangan skala besar 16 unit, skala menengah 37 unit dan skala kecil 224 unit. Dari jumlah tersebut berkualifikasi sebagai badan usaha berbentuk PT 3 unit, CV 118 unit, koperasi aktif 25 unit dan pedagang pasar 81 unit.

6. Hukum dan Aparatur

Pada era otonomi daerah, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) semakin gencar disuarakan oleh berbagai komponen bangsa. Reformasi di tubuh pemerintahan dilakukan dengan penegakan supremasi hukum (*the rule of law*) kepada seluruh aparat penyelenggara negara. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, menyiratkan kemandirian hukum merupakan prasyarat bagi terselenggaranya *check and balances* dalam penyelenggaraan negara.

Tidak dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat sejumlah praktek penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Praktek KKN dalam berbagai bentuk dan corak pada dasarnya merugikan kemaslahatan orang banyak. Praktek ini mungkin saja memberikan keuntungan bagi yang melakukannya, namun konsekuensinya menimbulkan kerugian di dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat pada proses pengujian kelayakan (*fit and proper test*) bagi calon pejabat daerah dan mekanisme yang ketat dalam proses penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Tidore Kepulauan.

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan dan tantangan pembangunan diberbagai bidang dan kehidupan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan antara lain sebagai berikut :

1. Sosial dan Budaya

- a. Penduduk miskin masih tinggi, yaitu 14.3%. dengan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita yang telah disesuaikan perbulan

adalah 300.000. Namun baru dicapai sebesar Rp. 207.610 perbulan

- b. Kearifan lokal penduduk Kota Tidore Kepulauan dalam sektor pertanian, perikanan dan peternakan belum dikelola secara optimal.
- c. Belum sepenuhnya jangkauan pelayanan kesehatan secara merata disetiap wilayah dan di satu sisi masih dijumpai adanya kondisi kesehatan lingkungan masyarakat, karena rendahnya kesadaran berperilaku bersih dan sehat.
- d. Tantangan utama bagi pengembangan gender adalah terbatasnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintahan, termasuk keterlibatan perempuan di dalam partai politik.
- e. Tenaga kerja berusia produktif masih mendominasi klasifikasi pendidikan rendah, sehingga dalam mengisi pasar kerja, terbatas sebagai pekerjaan kasar dengan upah rendah. Di satu sisi kebiasaan masyarakat yang bergantung pada berkah alam serta cepat puas dengan hasil yang diperoleh sehingga berpengaruh pada etos kerja yang rendah, sebagai akibat dari rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan.
- f. Belum optimalnya pembinaan di bidang keagamaan secara bersinergi untuk menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian pula belum di optimalnya penggalangan dan pemanfaatan zakat, infaq dan

shodaqoh untuk mendukung pengembangan ekonomi umat.

2. Politik, Hukum dan Aparatur

- a. Pendidikan politik yang merupakan alat transformasi sosial belum dikembangkan secara optimal. Di samping itu tantangan dibidang pendidikan politik dan melembagakan pers/media massa masih relatif terbatas, sehingga berimplikasi pada lemahnya akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, memudahkan kontrol publik dalam proses menemukan dan mencegah penyelewengan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Penegakan supremasi hukum masih diperhadapkan dengan kendala adanya praktek suap dan mafia peradilan.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Adanya duplikasi dokumen rencana tata ruang pengembangan wilayah yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan belum dipaduserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kota Tidore Kepulauan.
- b. Kesenjangan pembangunan antar wilayah, antarkawasan, dan keterisolasian masyarakat perdesaan/kampung dengan kota merupakan tantangan dalam upaya mencegah tumbuhnya kawasan kumuh, intensitas banjir atau abrasi pantai.

- c. Belum tertatanya kepemilikan tanah ulayat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4. Ekonomi

- a. Terbatasnya akses para pelaku ekonomi terhadap sumber-sumber pembiayaan perbankan, dan terbatasnya infrastruktur ekonomi sangat berdampak pada rendahnya nilai tambah atas produk yang dihasilkan.
- b. Terbatasnya pemahaman dan kesadaran terhadap hak-hak dasar masyarakat mengakibatkan kemiskinan.

5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Pemanfaatan sumber daya alam belum mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
- b. Adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan habitat, akibat dari aktifitas di bidang pertambangan, penebangan hutan dan pembangunan lainnya.

C. NILAI-NILAI STRATEGIS

Nilai strategis yang mengilhami RPJP 20 Tahun adalah keseluruhan kekuatan daerah yang dimiliki dan dapat didayagunakan untuk mendukung pembangunan Kota Tidore Kepulauan, yang secara spesifik meliputi 3 (tiga) variabel yakni : (1) Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara; (2) Potensi Laut dan Perairan; dan (3) Pulau Tidore sebagai Cagar Budaya.

1. Kota Sofifi Sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara.

Kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara yang berada dalam wilayah hukum Kota Tidore Kepulauan cukup strategis dari sisi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sebagai pusat pemerintahan provinsi maupun pusat jasa-jasa umum lainnya, keberadaan kota Sofifi akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pembangunan Kota Tidore Kepulauan.

2. Potensi Laut dan Perairan

Wilayah laut dan perairan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 11 pulau-pulau kecil akan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari potensi keindahan alam bawa laut di pulau Tidore, Maitara, Mare dan gugus pulau Woda.

Demikian pula intensitas jalur transportasi air yang menghubungkan pulau Tidore (pelabuhan Rum – Bastiong ternate), Soasio – Sofifi – Ternate dan Soasio – Gita – Ternate merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus hidup sepanjang tahun. Diharapkan jalur transportasi ini juga dapat berkembang antara pulau Tidore dengan kabupaten lain disekitarnya.

3. Pulau Tidore sebagai Cagar Budaya

Nilai-nilai historis seperti Kesultanan Tidore telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban tertua di Indonesia. Terdapat bukti-bukti fisik yang memperlihatkan adanya sistem tata pemerintahan yang berjalan secara harmonis. Menyatunya

nilai-nilai religius ke dalam praktek ritual adat-istiadat masyarakat Kota Tidore dan wilayah-wilayah pengaruhnya telah melahirkan suatu gambaran budaya yang unik. Hubungan Kesultanan Tidore dengan dunia luar seperti Eropa, Timur Tengah dan Melayu menciptakan akulturasi budaya yang unik.

Bekas-bekas fisik dan non-fisik dari akulturasi budaya tersebut dapat dilihat dari benda-benda artefak, seni arsitektur, seni tari tradisional, ritual keagamaan maupun tata cara hidup keseharian masyarakat. Sentuhan dengan kebudayaan luar tersebut melahirkan budaya Tidore Kepulauan yang terbuka, egaliter, demokratis, toleran dan adaptif dengan perkembangan modern.

BAB III

VISI, MISI DAN INDIKATOR KINERJA

A. VISI

Berdasarkan kondisi Kota Tidore Kepulauan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 Tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 adalah: **“TERWUJUDNYA KOTA TIDORE KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERPERADABAN”**

Visi tersebut merupakan harapan atau cita-cita luhur masyarakat Kota Tidore Kepulauan di dalam membangun daerahnya pada kurun dua puluh tahun ke depan. Visi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) variable penting yaitu :

Pertama, Kota Tidore Kepulauan Yang Maju adalah kemampuan mewujudkan kualitas pelayanan di berbagai bidang kehidupan dari segi daya dukung sumberdaya manusia yang cerdas, terampil dan profesional, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan memberi dampak bagi berdayanya fungsi-fungsi ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan. Oleh sebab itu, makna “kemajuan” disini tidak semata-mata merupakan pencapaian prestasi fisik-material tetapi juga prestasi non-fisik yang antara lain mencakup kematangan dalam memahami nilai-nilai budaya, moral keagamaan dan spiritualitas masyarakat.

Kedua, Kota Tidore Kepulauan Yang Mandiri adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah Kabupaten / Kota lain dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Kemandirian bukan berarti tidak memerlukan pihak lain, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada daerah lain, tetapi kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik antardaerah, daerah dan pemerintah pusat maupun kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal pembiayaan pembangunan, makna “kemandirian” juga dapat diartikan sebagai optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan pihak-pihak lain hanya ditujukan pada sektor-sektor strategis maupun proyek-proyek tertentu yang bersumber dari bantuan luar negeri.

Ketiga, Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban adalah kemampuan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab (*civil society* atau *masyarakat madani*), yakni masyarakat yang menyadari harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai makhluk individu dan sosial, menghargai perbedaan, berkomitmen pada penegakan keadilan (*social justice*, *‘adalah*), tenggang rasa (toleransi, *tasamuh*), seimbang (*balanced*, *wawzun*) dalam segala aspek, persamaan (egaliter, *musawwah*) terutama di muka hukum, kebebasan (*alhurriyyah*) dalam berekspresi, bertanggungjawab (*al-mas’uliyah*) dan berkedaulatan (*al-syuura*). Nilai-nilai

peradaban ini terbentuk berdasarkan perkawinan antara budaya lokal Tidore dengan nilai-nilai Islam (sebagai agama resmi Kesultanan Tidore) dan telah melahirkan kejayaan di masa lalu. Nilai-nilai masyarakat beradab seperti yang pernah terjadi tersebut perlu dilakukan penyegaran kembali untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban (*civility, al-madaniyyah*) di Kota Tidore Kepulauan pada masa depan.

B. MISI

Dalam mengoperasionalkan visi pembangunan Kota Tidore Kepulauan tersebut, berikut ini dikemukakan **5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan** sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kehidupan Yang Damai** adalah terpenuhinya pelayanan sosial dasar serta terbangunnya tatanan kehidupan sosial yang mapan dan harmonis. Adapun substansi yang terkandung di dalam misi ini harus ditempuh dengan langkah-langkah :
 - a. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta penataan dan pengembangan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan karakteristik daerah Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu dilakukan dengan santunan pendidikan (bebas SPP dan bantuan pakaian seragam sekolah), serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat membantu anak-anak penyandang cacat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

- b. Pembangunan kesehatan melalui pelayanan medis yang merata sampai ke pelosok perdesaan dengan memberdayakan Puskesmas di pusat kecamatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan balita, peningkatan gizi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta penambahan tenaga medis dan paramedis yang berkualitas.
- c. Pelayanan sosial bagi orang tua jompo dilakukan dengan kebijakan khusus (*affirmative action*) berupa pengadaan/rehabilitasi rumah layak huni dan pelayanan kesehatan di Puskesmas/RSUD di wilayah Kota Tidore Kepulauan tanpa dipungut biaya.
- d. Penghormatan terhadap hak-hak peran kaum perempuan di wilayah publik berupa pemberian kesempatan bagi kaum perempuan menduduki jabatan struktural pengambil keputusan di bidang pemerintahan serta memperoleh prosentasi kuota yang proporsional di lembaga legislatif.
- e. Pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan klasifikasi tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi.
- f. Peningkatan pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian lainnya dengan dukungan penegakan hukum yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hukum.
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersama secara rukun dan damai dengan sikap toleran, terbuka dan sikap solidaritas yang tinggi serta memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah dan masyarakat. Demikian pula penguatan peran *civil society* (mahasiswa, pekerja, LSM, ormas, partai politik, organisasi profesi, lembaga adat

dan keagamaan) untuk mengawal proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.

- h. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak cepat merasa puas dengan prestasi yang diraihinya tetapi terus meningkatkannya, baik dari segi pendidikan, ketrampilan, kesejahteraan ekonomi maupun kemajuan daerah.

2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh dan Berdaya Saing

adalah tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama dari usaha perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang mendorong peningkatan PDRB Kota Tidore Kepulauan secara signifikan dan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 7 (tujuh) persen pada tahun 2025. Adapun substansi yang terkandung di dalam misi ini harus ditempuh dengan langkah-langkah :

- a. Pengembangan perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam potensial dan kearifan tradisional masyarakat dalam pengelolaan komoditas unggulan lokalnya di masing-masing desa dan kecamatan atau kawasan tertentu.
- b. Peningkatan usaha pertanian masyarakat berorientasi daya saing melalui pengembangan perwilayahan komoditas, pengembangan teknologi pra dan pasca panen serta pengembangan areal pertanian dan hortikultura unggulan spesifik lokal.
- c. Peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui pengembangan alat tangkap dan peningkatan hasil tangkap nelayan tradisional untuk konsumsi masyarakat di pulau Tidore maupun kota Sofifi, pengembangan

industri kecil di bidang kelautan dan perikanan serta revitalisasi kelembagaan ekonomi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

- d. Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM maupun industri kecil melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan, studi banding dan magang serta bantuan modal dan peralatan teknik.
- e. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi perbankan dan nonperbankan berorientasi kesejahteraan masyarakat desa antara lain unit bank, BPR, Asuransi Takaful Syariah, koperasi simpan pinjam serta lembaga lelang dan pegadaian.
- f. Pengembangan pola insentif bagi kegiatan investasi dan perdagangan melalui paket regulasi ekonomi yang sehat dan kompetitif.
- g. Pengembangan sentra ekonomi dan sentra bisnis maupun pelayanan jasa perekonomian lainnya di pulau Tidore dan Kota Sofifi, serta penguatan institusi pasar tradisional di daerah kecamatan.
- h. Pengembangan wilayah Kecamatan Oba dan Oba Selatan sebagai kawasan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan sentra produksi (KSP) sekaligus berfungsi sebagai wilayah penyangga kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Demokratis adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*), terjaminnya penegakan hukum terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh parlemen daerah yang

kuat serta legitimasi penuh masyarakat. Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis adalah daerah yang aman dan damai karena warganya taat dan patuh terhadap hukum di satu sisi, dan di sisi lain, hak-hak masyarakat terlindungi dan terakomodasi dalam sistem sosial, ekonomi politik dan pemerintahan. Adapun substansi yang terkandung di dalam misi ini harus ditempuh dengan langkah-langkah :

- a. Opimalisasi penerapan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh.
- b. Peningkatan koordinasi pengawasan antarinstansi yang berwenang terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks pengawasan internal, eksternal dan pengawasan publik.
- c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efisiensi dan efektifitas urusan birokrasi melalui pelayanan terpadu.
- d. Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) yang dilandasi asas sosial dan kemanusiaan, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik dan parlemen daerah yang mendukung proses komunikasi, artikulasi, agregasi, rekrutmen dan pendidikan politik masyarakat.

- f. Pengembangan rekrutmen dan kaderisasi politik yang mendukung redistribusi kekuatan politik secara demokratis.
- g. Peningkatan akses dan ruang publik kepada kelompok penekan (*pressure group*) maupun kelompok kepentingan (*interest group*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan pemerintahan.
- h. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan.
- i. Pengembangan jaringan komunikasi antara lembaga legislatif, eksekutif, ornop, dan kelompok-kelompok strategis lainnya yang mendukung pendewasaan budaya politik daerah.

4. Mewujudkan Masyarakat Berperadaban (*Civility, al-Madaniyyah*) adalah suatu kondisi yang tercipta dari masyarakat beradab (*civil society* atau *masyarakat madani*), yakni masyarakat yang menyadari hak dan kewajibannya, menghormati segala bentuk perbedaan latarbelakang (*tasamuh*), menjunjung tinggi nilai-nilai “*adat se atorang*” sebagai budaya adiluhung yang mampu membendung pengaruh destruktif kebudayaan modern, memiliki etos kerja tinggi, menjunjung tinggi keadilan (*social justice, ‘adalah*), seimbang (*balanced, wawzun*) dalam segala aspek, persamaan (*egaliter, musawwah*) terutama di muka hukum, kebebasan (*freedom, al-hurriyyah*) bertanggungjawab (*accountability, al-mas’uliyah*) dan berkedaulatan (*al-syuura*) dan menghargai seseorang berdasarkan prestasi.

Adapun substansi yang terkandung di dalam misi ini harus ditempuh dengan langkah-langkah :

- a. Peningkatan kesadaran budaya “*adat se atorang*” yang bertujuan meningkatkan peran partisipatoris masyarakat dalam menyukseskan program-program pembangunan melalui langkah-langkah ketahanan budaya yang terorganisir dan terprogram dengan dukungan penuh dan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Peningkatan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat melalui penataan kelembagaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
- c. Pengembangan kreatifitas ilmiah di bidang kebudayaan yang bertujuan mensosialisasikan gagasan-gagasan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan dan wawasan kebudayaan serta mendorong etos kerja masyarakat.
- d. Revitalisasi institusi-institusi kebudayaan dan reorientasi pandangan kebudayaan konvensional ke arah yang lebih terbuka dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.
- e. Pengembangan nilai-nilai adat dan budaya yang fungsional bagi pencitraan Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota yang berkeadaban.

5. Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Sebagai Pusat Pemerintahan adalah terbentuknya pusat pemerintahan yang mampu melaksanakan pelayanan pemerintahan secara koordinatif serta mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Tidore Kepulauan memiliki

sumberdaya aparatur serta latarbelakang historisnya sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Tidore, pusat pemerintahan (transisional) Provinsi Irian Barat dan terakhir ditetapkan kota Sofifi (yang merupakan wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan) sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, dalam rangka pelayanan pemerintahan dan pembangunan, maka pusat pemerintahan Kota Tidore Kepulauan pada masa depan dapat berlangsung di kota Soasio maupun di kota Sofifi. Dalam hubungan ini, Soasio dan Sofifi dapat dikembangkan menjadi kota kembar (*sister city*) di dalam satu wilayah administratif berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsi pelayanan maupun berdasarkan urgensinya. Adapun substansi yang terkandung di dalam misi ini harus ditempuh dengan langkah-langkah:

- a. Pembangunan pusat pemerintahan yang berbasis pada daya dukung wilayah, kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur serta berorientasi pada pencapaian prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan administratif pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang cepat dan efektif berorientasi pada tingkat kepuasan masyarakat.
- c. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang dapat mengakses daerah pelayanannya (*remote area*) secara dinamis, dengan penempatan lokasi perkantoran yang bernuansa damai dan modern serta membangkitkan daya imajinasi, daya inovasi dan daya kreasi.

- d. Peningkatan sinkronisasi kebijakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di kota Sofifi sebagai wilayah Kota Tidore Kepulauan dan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan parasarana perkotaan di Soasio dan Sofifi yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa kemasyarakatan.

C. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

Untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi RPJP menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur pada setiap periode pembangunan, perlu diletakkan indikator kinerja pembangunan daerah secara makro dan merupakan konsensus bersama terhadap pentingnya pembangunan kualitas manusia sebagai parameter utama dalam mewujudkan tujuan akhir otonomi daerah yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penetapan 12 (dua belas) variabel indikator kinerja dan berbagai target / sasaran antara adalah merupakan pendekatan yang lebih bersifat minimalis atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dan berusaha untuk menjamin bahwa indikator kinerja pembangunan tersebut akan dapat dicapai pada tahun yang akan datang. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan Kota Tidore Kepulauan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Saat ini		Target/ Sasaran Tahun 2025
			2004	2008	
1	Pertumbuhan Penduduk	%	2,43	3,01	5,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71	5,79	7,00
3	PDRB Perkapita	Rp	2,51	3,08	4,13
4	Tingkat Inflasi	%	4,82	11,25	8,91
5	Partisipasi Angkatan Kerja				
	a. Jumlah	org	28.627	36,132	90,029
	b. Prosentasi	%	57,96	84,21	71,54
6	Angka Pengangguran				
	a. Jumlah	org	5.034	4,830	8,319
	b. Prosentasi	%	17,58	11,25	9,47
7	Pengangguran Terbuka				
	a. Jumlah	org	4.007	1,944	626
	b. Prosentasi	%	14,00	4,54	7,53
8	Angka Melek Huruf	%	93,12	96,80	97,61
9	Rata-rata Lama Sekolah	thn	7,2	8,3	9,5
10	Angka Putus Sekolah usia>15	%	4,88	3,19	2,00
	thn	%	24,58	20,00	18,00
11	Angka Kematian Bayi	thn	63,9	64,5	67,0
12	Angka Harapan Hidup				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			63	68,1	71,3

BAB IV
SASARAN, ARAH, DAN TAHAPAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 adalah “mewujudkan Kota Tidore Kepulauan yang maju dan mandiri di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya” sebagai rangkaian dan bagian integral dari tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.

Untuk mengukur pencapaian Kota Tidore Kepulauan Yang Maju dan Mandiri di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam kurun 20 Tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. SASARAN RPJP KOTA TIDORE KEPULAUAN 2005-2025

1. Terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas dan kehidupan yang damai di Kota Tidore Kepulauan,

ditandai oleh :

- a. Meningkatnya sumberdaya manusia berkualitas termasuk peran perempuan dalam pembangunan antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.
- b. Terjaminnya kehidupan para penyandang masalah sosial (anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, dan orang tua jompo).

- c. Tersedianya lapangan pekerjaan yang beragam dengan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar kerja maupun tunjangan/gaji yang sesuai.
- d. Hilangnya penyakit sosial berupa perjudian, minuman keras, penggunaan bahan psikotropika (narkoba), tindakan asusila lainnya serta keretakan dalam rumahtangga.
- e. Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya kesadaran setiap individu warga Kota Tidore Kepulauan untuk hidup aman dan damai.

2. Terwujudnya Perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing di Kota Tidore Kepulauan, ditandai oleh :

- a. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam daerah secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat dan dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai 7 (tujuh) persen dengan tingkat pengangguran terbuka tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- b. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kuat yang memberikan peluang berusaha masyarakat antara pelaku ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar.
- c. Tumbuh dan berkembangnya kegiatan agribisnis dan agroindustri dengan penerapan pola pengembangan komoditi unggulan pada kawasan KTM
- d. Terciptanya pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan adanya keterpaduan dan keserasian antar sektor. Sektor pertanian dalam arti luas akan terus menjadi

- konsentrasi pertumbuhan ekonomi dikelola secara lebih efisien dan berdaya saing.
- e. Terbangunnya infrastruktur ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah.
 - f. Adanya jaminan regulasi pemerintah daerah berupa insentif pajak dan kebijakan khusus lainnya di bidang investasi.

3. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan

Demokratis di Kota Tidore Kepulauan, ditandai oleh :

- a. Tersedianya kapasitas dan kapabilitas aparatur secara struktural dan fungsional serta memiliki keahlian teknis yang mendukung kualitas fungsi pelayanan.
- b. Semakin baiknya tatanan kehidupan yang demokratis melalui penataan sistem dan kelembagaan politik. Daerah yang dilandasi pada nilai-nilai demokrasi lokal yang disesuaikan dengan kemampuan dan daya cerna masyarakat terhadap pesan-pesan politik.
- c. Terjaminnya penegakan hukum, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

4. Terwujudnya Masyarakat Berperadaban (*Civility, al-Madaniyyah*) di Kota Tidore Kepulauan, ditandai oleh :

- a. Adanya kesadaran kolektif masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap nilai-nilai "*adat se atorang*" dalam konteks perilaku keseharian baik individu maupun sosial. Termasuk kesadaran bagi aparat pemerintah daerah dalam melakukan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun menjadi patokan bagi

anggota parlemen daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran pembangunan.

- b. Terbentuknya kepribadian masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan (*egaliter, al-musawwah*), menghargai perbedaan (*toleransi, al-tasamuh*), menegakan kebenaran dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf wa nahi munkar*), bertanggungjawab (*accountable, al-mas'uliyah*), seimbang (*balanced, wauzun*) antara hak dan kewajiban, iman, ilmu, amal, pencapaian prestasi materil dan spirituil, berdaulat (*al-syuura*), kebebasan (*freedom, al-hurriyyah*) dan adaptif dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan jatidiri budayanya.
- c. Teridentifikasinya kearifan lokal masyarakat Kota Tidore Kepulauan di bidang pertanian, ekonomi dan perdagangan maupun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Terciptanya pandangan hidup masyarakat terhadap nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan maupun nilai-nilai tradisi Kota Tidore Kepulauan sebagai modal dasar pembangunan.

5. Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan Sebagai Pusat Pemerintahan, ditandai oleh :

- a. Terbangunnya sarana dan parasarana pemerintahan di kota Soasio dan Sofifi yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektifitas dan urgensitas dukungannya terhadap kelancaran roda

- pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa kemasyarakatan.
- b. Terselenggaranya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berorientasi pada kemudahan rantai birokrasi, cepat, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang bertanggungjawab, transparan, terampil, berwawasan luas, menguasai bidang tugasnya, efisien, berwibawa, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*).
 - c. Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung oleh penegakan hukum serta pengawasan internal dan eksternal.
 - d. Terbangunnya hubungan koordinasi, komunikasi dan sinergitas anta level pemerintahan secara timbal-balik dalam kebijakan pembangunan lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah melalui kesepahaman program dan kegiatan pembangunan.
 - e. Meningkatnya daya dukung kota Soasio sebagai ibukota Kota Tidore Kepulauan dan kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara melalui peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan moda transportasi terpadu meliputi upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, antarkota, antar kawasan dan ketersisolasian masyarakat perdesaan / kampung dengan kota terutama di pulau Tidore bagian utara, pulau Maitara, Oba dan Oba Utara dengan skala prioritas pada

pengembangan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi.

B. ARAH RPJP KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2005-2025

1. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG DAMAI.

Kualitas sumberdaya manusia dan kedamaian sosial di Kota Tidore Kepulauan akan sangat tergantung pada sejauhmana pencapaian prestasi pembangunan di bidang sosial. Keberpihakan pada pembangunan sosial yang sungguh-sungguh akan banyak memberi dampak konstruktif bagi kemajuan daerah, karena indikator kemajuan suatu daerah diukur berdasarkan data dan atau faktor-faktor sosial yang tersedia. Kemajuan dan kemandirian sosial suatu daerah adalah sejalan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat daerah bersangkutan. Untuk itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Disamping itu, perlu peningkatan penataan sistem pelayanan sosial maupun ketersediaan sarana pelayanan sosial. Penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat dengan prinsip kesetaraan. Masyarakat yang tergolong miskin harus ditingkatkan pemahaman tentang potensi dan jati dirinya sehingga menimbulkan kepercayaan diri untuk menyelesaikan persoalannya secara swadaya serta perlu

diberikan akses dan dukungan bagi usaha-usaha produktif sehingga secara mandiri dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu indikator kemajuan dan kemandirian sosial itu adalah diukur berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di suatu daerah, termasuk tingkat Indeks Disparitas Gender (IDG). Hal lain yang penting disini adalah dukungan sarana dan prasarana sosial yang memadai serta komitmen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian sosial itu sendiri.

- a. Pembangunan ke arah kemajuan dan kemandirian sosial diarahkan untuk memperkuat peran institusi pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang menjangkau daerah-daerah belakang di pulau Tidore, Maitara dan desa-desa terpencil di Kecamatan Oba Utara dan Oba. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang belajar yang cukup, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, tunjangan pendidikan bagi tenaga pendidik, termasuk bebas SPP kepada siswa serta penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Di bidang kesehatan, perlunya pelayanan kesehatan yang terjangkau, ketersediaan dokter di Puskesmas, pelayanan medis dan paramedis yang cepat dan tanggap, obat-obatan dan peralatan kesehatan yang cukup serta rumah sakit rujukan yang memadai. Pembangunan pendidikan dan kesehatan harus diorientasikan pada penciptaan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi sumberdaya alam daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan

kemajuan daerahnya. Pengembangan pendidikan kejuruan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan terkait di luar daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kualitas *input* pembangunan sumberdaya manusia.

- b. Pemenuhan kebutuhan gizi yang berkualitas dimulai dari sosialisasi kesadaran gizi masyarakat, sehingga kekayaan sumber protein hewani dan nabati dimanfaatkan secara seimbang untuk memenuhi syarat kualitas gizi dan pangan di seluruh wilayah atau keluarga masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Keluarga merupakan unit terkecil yang merupakan pilar dalam pembangunan daerah untuk itu dilakukan upaya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu bagi terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu perlu dilakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Mobilitas penduduk mutlak diatur secara seimbang agar tersebar dengan merata sesuai dengan daya dukung lingkungan. Untuk itu upaya pembangunan hendaknya memperhatikan potensi wilayah, keragaman dan aspek budaya lainnya. Disamping itu, sistem administrasi kependudukan harus ditangani secara baik sehingga dapat menjadi *input* yang berarti bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta terjaminnya hak-hak penduduk dan perlindungan masyarakat.

- c. Pembinaan penyandang masalah sosial (PMS) seperti penderita gangguan jiwa, penderita ketergantungan obat dan psikotropika (korban narkoba), pengidap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya dilakukan perawatan dan pembinaan secara lokalistik, terfokus dan sungguh-sungguh bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dengan penyediaan dana pembinaan/perawatan yang sesuai.
- d. Pembinaan terhadap penyandang cacat dan anak terlantar, pemuda putus sekolah dan pengangguran dilaksanakan melalui lokalisasi dan pemusatan latihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan pilihan jenis ketrampilannya serta bantuan modal dan teknologi pasca pembinaan di BLK. Sementara itu masyarakat perlu diberikan pemahaman dan penyadaran untuk menghormati keberadaan penyandang cacat dan anak terlantar sebagai tanggungjawab mereka dan menerima mereka sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak hidup yang sama dan memperoleh pekerjaan yang layak.
- e. Pembangunan iptek mencakup upaya penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan terapan, pengembangan ilmu sosial dan humaniora bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pengembangan teknologi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan kemandirian dan daya saing penduduk dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama, etika,

kearifan lokal serta daya dukung dan kelestarian lingkungan.

- f. Pembangunan iptek diarahkan pada penyediaan informasi dan teknologi untuk mendukung upaya pembangunan diberbagai bidang terutama ketahanan pangan, sumber energi, sektor produksi, pendidikan dan bidang kesehatan. Selain itu, pengembangan SDM Iptek, peningkatan anggaran riset dan kebijakan riset lintas sektor. Pembangunan iptek tersebut merupakan kerjasama perguruan tinggi, berbagai lembaga penelitian dan dunia usaha pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- g. Pembinaan ketahanan sosial antara lain sosialisasi mitigasi bencana dan pencegahan wabah penyakit serta pembinaan kemasyarakatan dan kampanye kesetiakawanan sosial. Keamajuan dan kemandirian sosial adalah terjaminnya harta dan jiwa masyarakat dari musibah dan bala bencana dengan asuransi. Dalam hubungan ini, setiap anggota masyarakat adalah pemegang polis asuransi harta dan jiwa.
- h. Kondisi kaum perempuan di perdesaan yang selama ini menjalani kehidupannya secara tradisional, menjadi istri dan ibu rumahtangga pada waktu akan datang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya mengambil peran publik yang lebih luas. Dalam hal ini program pemberdayaan perempuan berupa peningkatan wawasan, ketrampilan, pembinaan, dan pendampingan

kelompok usaha ibu-ibu rumahtangga di perdesaan harus menjadi program kerja lintas sektor dan instansi pemerintah.

- i. Saat ini keterwakilan kaum perempuan dalam bidang pengabdian sebagai pegawai pemerintahan maupun tenaga pendidik dan paramedis sangat terbatas. Sementara keterlibatannya di bidang politik dan sektor-sektor publik lainnya sangat minim. Oleh sebab itu, pada masa depan, peran perempuan di bidang pemerintahan dan bidang-bidang pelayanan umum di Kota Tidore Kepulauan harus menjadi prioritas.

- j. Penyeimbangan kepadatan penduduk di Kota Tidore Kepulauan dilakukan dengan penataan pemukiman di pulau Tidore dan Maitara, pengembangan dan perluasan desa-desa potensial di wilayah Kecamatan Oba Utara dan Oba sebagai tempat pemukiman baru (*resettlement*) yang pada masa depan menjadi pusat ekonomi dan sosial. Selain itu perlunya kebijakan pembatasan penduduk dan pemukiman di kota Soasio dan Sofifi, untuk menghindari kesemrawutan bangunan fisik dan pemukiman kumuh di perkotaan. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah lebih diorientasikan di daerah perdesaan, sementara untuk daerah perkotaan diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana umum, ekonomi dan sosial serta

pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

- k. Pemerataan pendapatan yang ditandai menurunnya indeks gini dan tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruh wilayah akan melahirkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan / kampung, yang juga berarti berkurangnya kesenjangan antar wilayah.
- l. Penyediaan pelayanan air bersih, listrik dan jaringan komunikasi dan informasi (telepon kabel, telepon seluler, radio, TV, kantor pos) di perdesaan Kota Tidore Kepulauan merupakan prioritas pembangunan jangka panjang tahap pertama. Khusus tentang kantor pos diperlukan di ibukota kecamatan adalah guna memfasilitasi berbagai bentuk kebijakan subsidi Pemerintah di bidang pelayanan sosial dan ekonomi.
- m. Pembangunan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial (*social goods*) dan sumberdaya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan sehingga menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan (*demand and supply management*) ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air maupun untuk meningkatkan kapasitas

dan keandalan pasokan air. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di kawasan-kawasan rawan air bersih seperti di pulau Maitara, pulau Mare dan kawasan bagian utara pulau Tidore. Penyediaan air bagi kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan jasa lainnya bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi pada masa depan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan serta intervensi Iptek. Khusus ketersediaan air untuk sumber energi alternatif, hingga saat ini belum dilaksanakan namun pada masa depan akan menjadi energi alternatif yang sangat strategis.

- n. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan meliputi upaya untuk 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang terdiri atas air bersih, air limbah, persampahan, jalan kota, listrik dan telekomunikasi secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota; 2) mengembangkan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana dasar perkotaan; 3) menjamin keberlanjutan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan; dan 4) mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, udara dan tanah. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, pasokan air bersih dan listrik

yang cukup serta penciptaan kawasan pemukiman yang asri dan jauh dari kesan kumuh menjadi sangat penting. Disamping itu keberadaan sarana dan prasarana fisik sosial seperti gedung sekolah, rumah sakit, Puskesmas, sanggar kesenian, balai latihan kerja, tempat ibadah dan bangunan fisik sosial lainnya harus memperhitungkan faktor-faktor kenyamanan, keterjangkauan, kapasitas serta fungsinya memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat penggunaannya.

- o. Masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil dan tertinggal umumnya terisolasi secara geografi. Untuk itu perlu adanya kebijakan khusus dengan model pembangunan yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat setempat. Pendekatan pembangunan perumahan rakyat harus memperhatikan tingkat perkembangan masyarakat dan kondisi wilayah. Bagi masyarakat perkotaan dan di pinggiran kota haruslah layak huni dengan prasarana pendukung yang memadai serta dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat dipedesaan dan wilayah terpencil hendaknya dengan pendekatan khusus serta prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya setempat tanpa merusak fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Hendaknya masyarakat harus mendapatkan aksesnya secara mudah dan cepat terutama yang berkaitan dengan aktifitas sosial, budaya dan ekonomi produktif.

- p. Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di desa terpencil dan rawan pangan. Selanjutnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dilakukan penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan daerah, pendanaan dan sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
- q. Peningkatan jangkauan pelayanan pada daerah kecamatan dan desa tertinggal dilakukan dengan *political will* pemerintah dengan: 1) meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi yaitu dukungan transportasi antar moda secara terpadu dan optimal; r. memekarkan wilayah kecamatan dan desa; dan 3) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan, kawasan cepat tumbuh dan pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya yang merupakan wilayah tertinggal.
- r. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pembangunan perkotaan harus diupayakan dalam konteks pembangunan wilayah yang

lebih luas. Pembangunan perkotaan harus dikaitkan dengan daerah-daerah *hinterland* (kawasan *gura-gura*) yaitu daerah perdesaan sekitarnya. Pembangunan prasarana dasar harus mampu menyentuh wilayah perdesaan sehingga tidak semua sumberdaya di perdesaan mengalir ke daerah perkotaan tetapi memberi manfaat bagi masyarakat di perdesaan.

- s. Menempatkan hak ulayat masyarakat adat dalam kebijakan penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya atas lingkungan hidup masyarakat. Untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) maka pemetaan tanah ulayat harus diselesaikan dan mendapatkan kesepakatan masyarakat adat serta memiliki kekuatan hukum.

- t. Pengembangan kreatifitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat di segala aspek kehidupan, terutama di bidang olahraga dan kesenian harus menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Pemuda sebagai aset pembangunan dimasa depan harus ditingkatkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik. Disamping itu pada bidang olahraga difokuskan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olah raga. Selama ini disadari bahwa potensi sumberdaya manusia, khususnya kalangan usia muda di Kota Tidore Kepulauan di

bidang seni dan olahraga sangat potensial. Namun potensi tersebut tidak dapat berkembang secara baik karena tidak adanya pembinaan dan pembiayaan serta sarana dan prasarana pendukung yang sangat minim. Untuk itu, pengalokasian pembiayaan pembangunan bidang kesenian dan olahraga pada masa depan perlu ditingkatkan dan diprioritaskan pada bidang-bidang seni dan olahraga yang populer di masyarakat. Wujud dari tekad peningkatan prestasi seni dan olahraga ini adalah pembangunan kawasan khusus pengembangan seni dan olahraga di pulau Tidore.

- u. Peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam membina kehidupan sosial yang aman, damai, solider, harmonis dan agamis sangat dibutuhkan pada masa depan. Dengan demikian peningkatkan kapasitas kelembagaan agama dan adat dan peranserta tokoh-tokohnya dalam pembangunan tersebut dimulai dari hubungan koordinasi dan konsultasi antarpemerintah daerah dan tokoh-tokoh informal dalam masyarakat tersebut. Penataan dan pembinaan kelembagaan dapat berupa insentif bagi pembinaan sosial-keagamaan maupun jaminan kesejahteraan bagi para tokoh informal tersebut.
- v. Pembinaan kehidupan sosial yang maju dan mandiri tak boleh juga melupakan pembinaan internal keluarga. Pembinaan terhadap keutuhan rumah tangga yang *sakinan, mawadah wa rahmah* harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip agama (*syar'i*) yang berlaku di

masyarakat. Oleh sebab itu segala bentuk praktek disharmoni keluarga dan sosial berupa perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, pelecehan seksual, perselingkuhan dan perceraian harus dicegah dengan pembinaan mental keagamaan yang sungguh-sungguh.

2. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING

Perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing di Kota Tidore Kepulauan pada masa depan masih diharapkan bersumber dari sumbangan sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perikanan. Namun karena daerah ini pada masa depan akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, maka sumbangan sektor jasa dan pelayanan umum lainnya akan menjadi andalan utama perekonomian daerah ini. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan sangat rendah yakni berkisar 3 persen pada tahun 2005 dan diperkirakan mencapai diatas 7 persen pada tahun 2025 berdasarkan prediksi perkembangan dan pertumbuhan kota Sofifi ibukota Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan ekonomi Kota Tidore Kepulauan sampai saat ini meskipun terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, dirasakan berjalan lamban dan kurang memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap struktur perekonomian skala kecil dan menengah. Ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang jelas dan masih timpangnya struktur perekonomian secara nasional. Perolehan akses modal perbankan misalnya masih mengalami kerumitan dengan jaminan persyaratan kredit yang ketat dan

memberatkan. Sementara di sisi lain, pengoperasian lembaga-lembaga perekonomian di daerah, baik bank maupun BUMN tidak memberikan komitmen keberpihakan (prosentase laba dividen) kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Sebaliknya yang terjadi adalah pengerukan kekayaan dan sumberdaya daerah untuk kepentingan pusat.

- a. Penguatan perekonomian daerah yang berorientasi daya saing masih menjadi cita-cita pembangunan ekonomi Kota Tidore Kepulauan pada masa depan. Tetapi paling tidak hal ini dapat dimulai dengan peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang tersedia. Sumberdaya alam yang memiliki potensi ekonomis adalah perkebunan, perikanan dan kelautan. Mengingat posisi strategis wilayah Kota Tidore Kepulauan yang bersinggungan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, maka ikatan kerjasama ekonomi antardaerah Kabupaten/Kota tersebut perlu dirumuskan secara sistematis dan programatis. Perdagangan lokal diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif untuk menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan : (a) perkembangan kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat; (b) terintergrasinya aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal dan; (c) meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat.

- b. Keterkaitan oleh tersedianya sarana dan prasarana ekonomi (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas masyarakat juga harus didukung oleh penelitian dan pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ketersediaan infrastruktur ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah. Ke depan, penyediaan infrastruktur ekonomi dilakukan oleh pihak swasta sementara pemerintah daerah hanya sebagai perumus kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah.
- c. Peningkatan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan.
- d. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis: kawasan Pusat Pengembangan KTM, pusat-pusat permukiman masyarakat, kawasan perkotaan dan sekitarnya dalam sistem pengembangan wilayah terpadu sebagai kesatuan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan.
- e. Peningkatan PDRB yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya alam pertanian dan hasil laut serta sumbangan sektor jasa pelayanan umum dan perdagangan untuk mewujudkan kemajuan dan

kemandirian ekonomi di Kota Tidore Kepulauan dapat mencapai pertumbuhan 7 (tujuh) persen pada jangka panjang harus didukung oleh *political will* unsur pimpinan daerah (Pemerintah Daerah, DPRD, dan unsur-unsur terkait) dengan kebijakan regulasi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengukuran dan pengendalian kualitas.

- f. Pembentukan BUMD untuk mengelola sektor usaha strategis termasuk upaya mendirikan lembaga keuangan penjaminan daerah yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui upaya optimalisasi peran BUMD/LPD sekaligus sebagai mitra kerja dalam mendorong peningkatan kontribusi jasa keuangan Bank dan Non Bank dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan, selain itu semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
- g. Pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman LN perlu dimanfaatkan dengan baik, pajak terus di tingkatkan efektivitasnya untuk membiayai pembangunan. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah

penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik didalam penyediaan pelayanan dasar, sarana dan prasarana ekonomi untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah. Selain itu juga diarahkan optimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi pengeluaran daerah dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi aparatur dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

- h. Pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek, dan berdaya saing khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, kebutuhan masyarakat banyak. Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan UKM dikelola melalui kebijakan regulasi yang efisien, efektif non-diskriminatif, menjaga persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai regulator dan fasilitator pembangunan ekonomi di daerah perlu memberikan kebijakan khusus (*affirmative action*) bagi usaha-usaha perekonomian masyarakat lokal skala kecil seperti kelompok tani dan nelayan, pengrajin kebutuhan rumah tangga dan pengrajin hasil laut dengan bantuan

modal dan teknologi yang diperoleh dari partisipasi dunia usaha. Sedangkan bagi kegiatan investasi berskala menengah dan besar dilakukan kebijakan insentif pajak dan kebijakan khusus lainnya untuk meningkatkan laju perdagangan dan investasi.

- i. Sektor pariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan serta keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah serta adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Tidore Kepulauan untuk mendorong kegiatan ekonomi rakyat.
- j. Pengembangan Iptek untuk pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi seperti teknologi pembibitan, penangkapan/pemanenan dan pengawetan hasil-hasil komoditas unggulan daerah. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan melalui kegiatan agribisnis yang dinamis dan mampu bersaing di pasar. Sementara pembangunan industri yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis Iptek tersebut memerlukan sumberdaya manusia yang trampil, sehingga keterbatasan tenaga kerja trampil yang dialami oleh Kota Tidore Kepulauan akan dipenuhi dengan tambahan tenaga kerja trampil yang didatangkan dari luar daerah Kota Tidore Kepulauan.

- k. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dilakukan melalui peningkatan ketrampilan teknis usaha perekonomian skala lokal, pembukaan lapangan kerja baru, pengadaan tenaga kerja di sektor industri maupun pendidikan dan pelatihan khusus bagi tenaga satuan pengamanan dan polisi pamongpraja. Upaya untuk mewujudkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pemuda putus sekolah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam memecahkan tingkat pengangguran terbuka yang semakin bertambah.
- l. Keterkaitan antara struktur perekonomian, besar, menengah, mikro dan kecil tercipta melalui kemitraan yang sehat dan terklaster sesuai dengan skala usaha dan kemampuan masyarakat pelaku ekonomi pada masing-masing struktur. Sedangkan pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterpaduan dan keserasian antarsektor dilakukan dengan menempatkan sektor pertanian dalam arti luas sebagai *leading sector* dan sektor-sektor lain sebagai pendukung. Kebijakan insentif pajak dan kebijakan khusus lainnya di bidang investasi digalakkan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi.
- m. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumberdaya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan arahan rencana tata ruang wilayah. Dalam konteks ini penataan ruang wilayah harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan bagi pengembangan wilayah secara

terpadu, sinergi dengan melibatkan semua komponen (*stakeholder*) sesuai kondisi dan potensi wilayah dengan prinsip-prinsip kerja antara lain : 1) Sinkronisasi perangkat peraturan dan perundangan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan menerbitkan peraturan daerah sebagai implementasi UU No. 21 tahun 2001; 2) Pemetaan ruang wilayah dengan sinkronisasi wilayah adat masyarakat (hak ulayat) yang dilegalisasi dengan perundangan dan penataan serta pemanfaatan ruang sesuai fungsi peruntukan dan daya dukungnya; 3) Fungsi lindung kawasan dipertahankan 50 % harus terpenuhi; 4) Penetapan model pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup berbasis masyarakat dan berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan; 5) Pemulihan dan pengembalian lingkungan yang rusak kepada fungsinya semula untuk meningkatkan daya dukungnya; serta. Penetapan indikator lingkungan sebagai keberhasilan pembangunan yang dipatuhi dan terkoordinasi antar semua instansi pelaku pembangunan.

3. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN DEMOKRATIS

Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis harus menjadi komitmen setiap periode kepemimpinan daerah di Kota Tidore Kepulauan. Masyarakat yang maju dan mandiri secara politik akan melahirkan potret pemerintahan yang kuat dan kokoh sementara masyarakat yang lemah dan tergantung secara politik akan melahirkan potret pemerintahan yang lemah

dan gampang goyah. Potret masyarakat yang maju dan mandiri secara politik tersebut harus pertama kali datang dari kepemimpinan pemerintahan di daerah.

Dalam kerangka itu, maka reformasi birokrasi pemerintah daerah dimulai dari penerapan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh. Sedangkan untuk menciptakan kepemimpinan pemerintahan daerah yang berwibawa dan demokratis, diperlukan pranata penegakan hukum dan penertiban kehidupan sosial serta tatanan struktur dan mekanisme politik yang stabil dan kondusif. Masyarakat yang maju dan mandiri secara politik akan menjadi masyarakat yang demokratis. Sedangkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis diperlukan kelembagaan sosial dan politik yang kuat, tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat Kecamatan dan Desa serta transparansi dan akuntabelnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- a. Peningkatan kualitas aparat birokrasi ditujukan untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) pada semua struktur dan tingkatan aparat birokrasi yang profesional, tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, aparat birokrasi yang terlibat maupun yang bebas dari praktek KKN perlu diberlakukan tindakan yang adil dan tegas, baik berupa penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*) sebagai pemicu prestasi maupun efek jera. Peningkatan pengawasan baik internal, fungsional dan pengawasan masyarakat serta

peningkatan etika birokrasi akan menjadi penekanan dalam langkah-langkah persuasif pemeberantasan praktyek KKN di dalam birokrasi pemerintah daerah. Kebijakan yang diterapkan pun berdasarkan hukum dan tidak diskriminatif. Untuk menghindari praktek KKN di kalangan birokrasi, maka penciptaan budaya kerja yang menghargai prestasi seseorang harus menjadi komitmen bersama antar pimpinan dan bawahan.

- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efisiensi dan efektifitas urusan birokrasi tersebut dilaksanakan melalui pelayanan terpadu dengan meminimalisir rantai birokrasi yang panjang. Kinerja birokrasi yang demikian itu ditunjang oleh peningkatan kesejahteraan aparatur berupa gaji dan tunjangan fungsional dan struktural yang adil dan setara tanpa mencederai rasa solidaritas sosial.
- c. Potensi konflik horisontal diyakini tidak akan ada lagi di masa depan, namun pencegahan terhadap munculnya konflik horizontal tetap harus diwaspadai yaitu dengan pendekatan pembinaan kesadaran hukum yang persuasif. Penegakan hukum untuk tertib sosial harus lebih mengedepankan pendekatan *prosperity* dibanding pendekatan *security* agar muncul kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dan harmonisasi sosial. Penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa depan diupayakan dilakukan oleh masyarakat saja, sedangkan aparat

penegak hukum hanya menjadi fasilitator dan pelayanan administrasi saja. Ke depan kesadaran masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri akan semakin bertambah, yaitu berani mengoreksi kesalahan pelanggaran hukumnya dan berjanji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Terciptanya kesadaran individu akan berkembang menjadi kesadaran komunal sehingga terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan wujud kemajuan dan kemandirian politik.

- d. Pembangunan ketertiban masyarakat maupun pertahanan dan keamanan daerah yang tangguh ditujukan terutama diarahkan pada keterlibatan TNI/Polri dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dan mempererat hubungan kerjasama antara masyarakat dengan aparat TNI/Polri. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum oleh aparat Polri diarahkan pada bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan, bimbingan dan pelatihan ketertiban lalu lintas, pencegahan penggunaan obat-obat terlarang dan bahan psikotropika, pemberantasan tindak kriminal, peningkatan daya tanggap terhadap aduan masyarakat, pelayanan administrasi yang cepat, efektif dan murah, maupun pencegahan praktek pungutan ilegal (praktek korupsi) oknum aparat kepolisian di jalan raya maupun dalam pengurusan administrasi dan rekrutmen anggota Polri bagi putra/putri daerah Kota Tidore Kepulauan. Sementara pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara oleh TNI diarahkan pada pelatihan bela negara

dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda, pembibitan dan rekrutmen anggota TNI yang diprioritaskan bagi putra/putri daerah Kota Tidore Kepulauan dan peningkatan keamanan teritorial. Peningkatan kesejahteraan anggota TNI/Polri antara lain pembangunan asrama prajurit TNI dan personel Polri, pembangunan perumahan TNI/Polri. Pemerintah daerah juga memfasilitasi pembebasan lahan bagi pembangunan markas atau kantor TNI/Polri.

- e. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang diarahkan dengan memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan serta membentuk perilaku masyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dibarengi dengan dukungan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang murah.
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik dan parlemen daerah yang mendukung proses politik diarahkan pada komunikasi, artikulasi, agregasi, rekrutmen dan pendidikan politik masyarakat yang lebih toleran, terbuka dan menghargai perbedaan saluran aspirasi politik. Kedewasaan politik masyarakat ini dapat terwujud atas landasan kesadaran politik untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan bukan politik untuk kepentingan kelompoknya semata. Oleh

sebab itu keberadaan partai politik di daerah pada masa depan harus mampu menjadi katalisator dan pemersatu rakyat dan bukan menjadi pemecahbelah rakyat. Masyarakat yang hidup dalam alam kemajuan dan kemandirian politik akan menaruh harapan yang besar terhadap partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

- g. Pengembangan rekrutmen dan kaderisasi politik yang mendukung redistribusi kekuatan politik secara demokratis perlu mempertimbangkan keterwakilan kelompok-kelompok sosial, baik kelompok penekan (*pressure group*) maupun kelompok kepentingan (*interest group*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan pemerintahan. Peran media massa di daerah dalam mengartikulasikan pesan-pesan politik harus diarahkan pada pilihan-pilihan rasional dan pendewasaan politik secara menyeluruh. Pemerintah daerah memfasilitasi jaringan komunikasi antara lembaga legislatif, eksekutif, ornop, dan kelompok-kelompok strategis lainnya yang mendukung pendewasaan budaya politik di daerah.
- h. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi politik maupun prinsip-prinsip kepatutan yang ada, sehingga keberadaan kaum perempuan di dalam politik hanya dipandang sebagai komplementari semata dan bukan berdasarkan pertimbangan rasional.

- i. Peningkatan budaya dan kesadaran politik untuk generasi muda diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan dan patriotisme serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas kebangsaan yang kuat.

4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPERADABAN (*Civility, Al-Madaniyyah*)

Terwujudnya masyarakat berkeadaban di Kota Tidore Kepulauan merupakan cita-cita pembangunan yang sejak lama didambakan masyarakat. Keyakinan akan kemampuan diri sendiri muncul dari kesadaran masyarakat tentang kekayaan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan yang tumbuh, berkembang dan lestari hingga saat ini. Nilai-nilai kebudayaan itu memberi inspirasi dan daya tonjok psikologis (*psychological striking force*) bagi kreatifitas dan daya inovasi masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. Kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas lokal dalam pergaulan kehidupan modern yang serba kompetitif.

- a. Masyarakat yang maju dan mandiri akan memberikan arah bagi terwujudnya identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi panutan masyarakat. Dalam konteks itu, nilai-nilai kearifan lokal "*adat se atorang*" merupakan identitas daerah yang tidak sekedar sebagai nilai budaya yang pasif tetapi menjadi nilai yang hidup di dalam hubungan interaksi sosial, ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan. Pembangunan sosial yang damai, politik yang aman, hukum yang adil, ekonomi yang sejahtera

dan berbagai aspek kehidupan ini pada dasarnya berawal dari cara pandang masyarakat terhadap budaya sebagai bagian paling mendasar dari kehidupan individu dan sosial. Cara pandang dan praktek budaya yang demikian diyakini akan mampu merespon modernisasi secara positif, produktif dan dinamis.

- b. Kekayaan khazanah kebudayaan Kota Tidore Kepulauan yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan sosial dalam satu ikatan *Soa* menjadi dasar bagi pembentukan tatanan kehidupan masyarakat dan daerah yang lebih damai dan lebih sejahtera. Semboyan "*inofoma katinyinga*" mengandung ajakan penyatuan visi dan persepsi pembangunan yang sama ke arah kemajuan dan kemandirian daerah. Begitu juga konsep "*mayae*" atau "*mabari*" memiliki makna kebersamaan, gotong-royong dan solidaritas sosial. Pengembangan budaya "*mayae*" dan "*mabari*" melahirkan sikap hidup yang penuh dengan sikap keprihatinan dan solidaritas sosial yang tinggi. Konsep budaya ini mengandung unsur empati sosial-kemanusiaan yang dapat mengantarkan individu pada kecerdasan emosional (*emotional quotient*) dan kecerdasan rohani (*spiritual quotient*). Nilai-nilai budaya tersebut pada masa depan perlu dikembangkan dalam konteks pergaulan yang lebih terbuka yang dilandasi nilai-nilai etika/moral keagamaan. Dalam konteks kehidupan modern yang kompetitif, diperlukan upaya reaktualisasi budaya, terutama terkait dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat tersebut.

- c. Nilai-nilai budaya lokal “*adat se atorang*” yang sejalan dengan nilai-nilai agama melahirkan semangat persatuan dan kesatuan (*foma katinyinga*), kebersamaan (*fomaku gosa, fomaku hoda*), kerjasama (*mayae, mabari*) dan saling menasehati (*fomaku waje*), harus semakin dikembangkan dalam konteks pergaulan yang lebih terbuka yang dilandasi nilai-nilai etika/moral keagamaan. Dalam konteks kehidupan modern yang kompetitif, diperlukan upaya reaktualisasi budaya, terutama terkait dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat. Jadi, suatu nilai budaya atau kearifan tradisional tertentu bukan hanya merupakan rutinitas hidup semata (yang tidak memiliki daya kreatif) tetapi memerlukan rekayasa budaya (*cultural engineering*) sehingga ia dipandang lebih hidup dan bermakna bagi pembangunan masyarakat dan daerah di masa depan.
- d. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan adat dan nilai-nilai budaya asli Tidore Kepulauan diarahkan untuk mewujudkan karakter dan jati diri masyarakat Tidore Kepulauan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai-nilai “*adat se atorang*” Tidore Kepulauan dengan nilai-nilai etos kerja yang tinggi, profesionalisme dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri masyarakat dilaksanakan melalui mengembangkan nilai-nilai adat yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

- e. Budaya berprestasi dan inovatif terus dikembangkan agar mampu bersaing dengan daerah lain, nasional dan dalam persaingan global. Pengembangan budaya berprestasi dan inovatif dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis, pengembangan kreatifitas masyarakat di bidang seni dan olahraga, menerima perubahan dan mengarahkan budaya konsumtif masyarakat menuju budaya produktif. Kreatifitas berkesenian tetap di dorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional, sedangkan pengembangan olahraga diarahkan pada pengembangan prestasi maupun peningjatan taraf kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Suatu peradaban yang maju dan mandiri tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai spiritual yang menjadi panutan masyarakat. Antara nilai budaya dan nilai agama adalah dua sisi mata uang yang saling berkelindan, sehingga pembangunan kebudayaan diarahkan pada peningkatan citra dan identitas budaya yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi anutan masyarakat sejak dahulu kala. Pemberlakuan simbol-simbol kebudayaan yang sarat dengan pesan agama seperti cara berpakaian, cara berbicara dan cara bersikap adalah tindakan budaya yang terinsiprasi dari ajaran agama. Selain itu, interaksi dan pergaulan sosial, upacara sosial, bahkan bentuk-bentuk kreatifitas modern, baik fisik maupun nonfisik harus mencerminkan praktek kebudayaan yang terinsiprasi dari ajaran agama.

- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan agama dan adat diarahkan untuk meningkatkan tugas, fungsi dan peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama menyebarkan nilai-nilai budaya dan agama dalam kehidupan modern yang semakin beragam. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan adat dan nilai-nilai budaya asli Tidore Kepulauan diarahkan untuk mewujudkan karakter dan jati diri masyarakat Tidore Kepulauan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai-nilai "*adat se atorang*" Tidore Kepulauan dengan nilai-nilai etos kerja yang tinggi, profesionalisme dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pembangunan jatidiri masyarakat dilaksanakan melalui pengembangan nilai-nilai adat yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Sedangkan, pembangunan keagamaan diarahkan untuk memajukan dan memandirikan budaya masyarakat ke arah kebaikan duniawi-ukhrawi. Terkait dengan hal tersebut, pendidikan keagamaan disamping untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip doktrin agama (*aqidah*) juga diarahkan pada prinsip-prinsip kehidupan sosial (*mu'amalah*) antara lain sikap hidup yang maju dan mandiri sebagai pelaku budaya dalam kehidupan individu dan sosial.
- h. Dampak buruk dari penetrasi nilai budaya modern yang menghempaskan kearifan tradisional masyarakat perlu dibentengi dengan merevitalisasi konsep budaya yang statis dan seolah-olah menjadi otoritas kaum adat

menjadi konsep budaya yang terbuka bagi semua orang dengan daya filter yang cermat dan tanggap terhadap perubahan. Konsep kemajuan dan kemandirian budaya diperoleh dari sikap masyarakat memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisional lama yang baik dan mengambil unsur-unsur atau nilai budaya modern yang lebih baik untuk kemajuan masyarakat dan daerah Kota Tidore Kepulauan.

5. MEWUJUDKAN PUSAT PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

Wilayah Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah otonom yang unik, karena ia sebagai wilayah Kota, namun cakupan wilayahnya ibarat sebuah wilayah Kabupaten. Wilayah Kota Tidore Kepulauan yang meliputi pulau Tidore, pulau Mare dan pulau Maitara serta sebagian pesisir barat bagian tengah pulau Halmahera merupakan wilayah administratifnya. Hal ini membutuhkan energi ekstra untuk menunaikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan daya dukung wilayah dari segi kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur maupun minimnya infrastruktur wilayah merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pemerataan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau daerah-daerah terbelakang dan terisolir.

- a. Masyarakat akan merasa terpuaskan dengan pelayananan pemerintah daerah apabila segala urusan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan dilaksanakan dengan tingkat kecepatan dan kemudahan yang tinggi. Untuk itu perlu didukung oleh

optimalisasi peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dan menguasai bidang pekerjaannya.

- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu mengakses daerah pelayanannya (*remote area*) secara dinamis dan kontinyu dengan dukungan kuantitas dan kualitas aparatur, sarana dan prasarana yang memadai dan kemampuan menformulasi kebijakan dan pengambilan keputusannya sehingga antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya tidak saling bertentangan.
- c. Wilayah cakupan yang luas dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang cukup kompleks membutuhkan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah cepat dan efektif serta untuk menghindari menghindari kebijakan yang tumpang-tindih bahkan bertentangan, dapat diatasi dengan mengembangkan sistem pelayanan satu atap (*one top services*) yang meliputi pembangunan jaringan kerja (*networking*) pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandalkan kemampuan komunikasi kabel dan seluler, internet dan teknologi multimedia lainnya. Sistem instalasi jaringan komunikasi, baik seluler maupun kabel termasuk jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan daratan Halmahera (kota Sofifi) dengan pulau Tidore (kota Soasio) perlu menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di masa depan.

- d. Peningkatan sinkronisasi kebijakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di kota Sofifi sebagai wilayah Kota Tidore Kepulauan dan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara harus dilakukan untuk menghindari perbenturan kepentingan dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota. Walaupun pusat pemerintahan Kota berada di Tidore, namun tidak berarti tidak terdapat kantor pemerintahan Kota di kota Sofifi tergantung efektifitas, efisiensi dan pertimbangan teknis tertentu. Dalam kerangka itu, perlu percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di Tidore dan Sofifi yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa masyarakat.
- e. Kebijakan pembangunan di masa depan harus berpihak kepada peningkatan kesejahteraan di kecamatan dan desa-desa terpencil dan tertinggal. Pembangunan harus ditujukan untuk mengurangi, meminimalkan dan meniadakan kesenjangan antar wilayah. Upaya ini dilaksanakan dengan menjadikan kebijakan penataan ruang sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan keseluruhan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan harus menjadi payung bagi pengambilan kebijakan pembangunan sektor, pembangunan wilayah maupun pemanfaatan ruang.

- f. Peningkatan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan.
- g. Peningkatan sistem hubungan interkoneksi antarkota Kecamatan dan pusat Kota, dan kota Provinsi melalui pengembangan jaringan transportasi darat prioritas utama yaitu pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan kecamatan Oba Selatan dan Kecamatan Oba Utara, dengan kota Sofifi serta jaringan moda transportasi laut dan penyeberangan yang cepat dan lancar dari dan ke pulau Tidore maupun dari dan ke kota Sofifi. Pembangunan modal transportasi yang aman dan lancar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lintas kabupaten/kota, kabupaten dengan pusat-pusat pelayanan di kecamatan dan desa-desa terpencil harus menjadi bagian penting pembangunan infrastruktur wilayah.
- h. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) hendaknya memperhatikan pengembangan kawasan ekonomi dan perkotaan (utamanya pengembangan kota Tidore dan Sofifi) serta mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat melalui penataan kepemilikan, pemetaan dan pembakuan tanah ulayat. Selain itu perlu disusun Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) dan Rencana Tata Ruang Kecamatan (RTRK) untuk

menghindari adanya abrasi pantai, bahaya banjir dan permukiman kumuh di perkotaan dan lain-lain.

- i. Pembangunan perkotaan dengan prinsip-prinsip antara lain, melibatkan *stakeholders* kota, bertumpu pada budaya lokal yang spesifik, sehingga kota berkembang atas landasan budaya dan mempunyai jatidiri yang mantap serta mencerminkan keadilan sosial (*social justice*) melalui mekanisme dan kapasitas pelayanan perkotaan serta peningkatan produktivitas perkotaan dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan dan ekonomi wilayah yang lebih luas.
- j. Pembangunan perkotaan dan infrastruktur didorong untuk dilaksanakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private-community partnership*), dengan penguatan peran swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan wilayah dan kota, sedangkan peran pemerintah adalah pendorong dan penggerak pembangunan yang dilakukan oleh komponen-komponen dalam masyarakat.
- k. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan berkualitas ditujukan kepada pengembangan sistem jaringan transportasi darat, udara, laut dan penyeberangan serta pengembangan sistem jaringan prasarana dasar perkotaan (jalan kota, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air

limbah, persampahan, jaringan pos dan telekomunikasi).

1. Peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) secara efektif terhadap pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang secara efektif dalam kerangka keserasian dan keberlanjutan, sosialisasi kebijakan penataan ruang dan rencana tata ruang, partisipasi *stakeholders*, dan terpenting adalah koordinasi antarlevel pemerintahan berkaitan dengan kebijakan penataan ruang.

C. TAHAPAN DAN PRIORITAS RPJP KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2005-2025

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun semua itu harus bersifat berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan (lihat lampiran). Dan diantara prioritas masing-masing misi, dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama

menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahannya. Atas dasar ini, maka tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

1. RPJM ke-1 (2005-2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM ke-1 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembinaan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun mengalami peningkatan, begitu juga pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, tunjangan kesejahteraan di bidang pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas tenaga medis dan paramedis serta optimalisasi fungsi Puskesmas.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta serta penguatan lembaga legislatif. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penataan struktur dan aparatur, efisiensi dan efektifitas pelayanan birokrasi, peningkatan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari pendapatan asli daerah maupun penerimaan pusat melalui pemetaan komoditas unggulan daerah, penelitian dan pengembangan potensi laut dan pesisir, serta

pemutakhiran data dan pengembangan informasi kondisi obyektif wilayah.

Pembinaan dan peningkatan partisipasi politik diarahkan pada penciptaan suasana yang damai dan bersahabat dalam merespon pelbagai aspirasi politik yang berkembang menjelang Pemilu legislatif, Pemilu presidensial maupun pemilihan kepala daerah. Peningkatan kedewasaan politik bermula dari tekad berbagai komponen partai politik untuk menciptakan kedamaian dan kebersamaan dalam berbagai kesempatan pesta demokrasi. Hal yang sama berlaku juga bagi peningkatan kesadaran hukum, dimana hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa adanya pengaruh kekuatan politik yang dominan dan kuat terhadap otoritas yudisial. Pembinaan dan pemberdayaan politik masyarakat di pedesaan dilakukan dengan pendekatan persuasif guna memperoleh gambaran yang jelas dari tuntutan aspirasi politik masyarakat maupun figur pemimpin daerah yang ideal menurut persepsi mereka.

Pembangunan kesejahteraan sosial melalui pintu agama didukung oleh ketersediaan media pendidikan keagamaan. Untuk mewujudkan pelayanan keagamaan yang efektif, dilakukan penyesuaian kurikulum, penyelenggaraan pendidikan sekolah dan madrasah berbasis asrama, pemberian santunan bagi imam dan badan *syara'*, maupun isentif bagi pembangunan rumah ibadah, balai desa dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Sedangkan pelayanan keagamaan di pedesaan dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi umat

yang bersumber dari dana Bazis maupun memfasilitasi pengurusan administrasi penyelenggaraan haji.

Pembangunan Kota Tidore Kepulauan didasarkan pada dua pilihan Rencana Tata Ruang kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan pada masing-masing sektor, lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan dua pilihan ruang tersebut berjalan sinergis, serasi dan saling menguntungkan secara berkelanjutan. Dalam penataan ruang, diperlukan peningkatan kompensasi SDM dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang dan efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

2. RPJM ke-2 (2011-2015)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM ke-2 diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), melalui penataan kembali kehidupan sosial yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, perlindungan terhadap hak hidup penyandang masalah sosial (anak yatim, orang tua jompo, penyandang cacat, korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika, tuna karya, tuna wisma

dll) sebagai wujud pelaksanaan masyarakat yang agamais (religius).

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan dokter masuk desa, optimalisasi fungsi puskesmas, pengadaan rumah sakit rujukan, penyediaan obat-obatan dan subsidi kesehatan. Penurunan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan dilakukan dengan penyuluhan kesehatan ibu dan anak yang menjangkau desa terpencil, penyuluhan gizi dan keluarga berencana serta kampanye hidup sehat.

Efektifitas dan efisiensi pengeluaran pembiayaan pembangunan dilakukan dengan memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak perlu. Penggunaan anggaran bagi pelaksanaan program SKPD dan unit kerja terkecil dilaksanakan seefisien mungkin dalam mengurangi tingkat kebocoran anggaran. Diantaranya penggunaan anggaran bagi perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi program dilakukan melalui sistem pelaporan hasil koordinasi dan konsultasi yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan peran dan partisipasi kaum perempuan di bidang politik dan pemerintahan di perkotaan diimbangi dengan pemberian peran bagi ibu rumahtangga di pedesaan melalui upaya pembinaan dan pelatihan keterampilan yang berorientasi pada peningkatan produktifitas ekonomi keluarga.

Pemberdayaan kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan dimulai dengan penyediaan infrastruktur kecamatan, meliputi peningkatan akses transportasi, energi kelistrikan, pos dan telematika, perumahan murah,

revitalisasi pasar desa, pengadaan instalasi air bersih dan sanitasi perdesaan. Pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana transportasi jalan dalam kota, antardesa dan antarpulau maupun pengadaan angkutan penyeberangan ditujukan untuk memperlancar akses ekonomi dan perdagangan serta peningkatan arus mobilitas angkutan penumpang dan barang dari dan ke pulau Tidore maupun ke wilayah kecamatan Oba dan Oba Selatan. Penyediaan air bersih di kawasan rawan air bersih, jaringan listrik, pos dan telematika serta pengembangan infrastruktur di bidang pariwisata merupakan bagian penting dan prioritas pembangunan pada periode RPJM ke-2.

Untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru dan menjawab kendala pemberdayaan kecamatan khususnya Kecamatan Oba dan Oba Selatan dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pengembangan KTM yang mencakup perencanaan ruang menuju terwujudnya sebuah kota, perencanaan usaha ekonomi yang mengutamakan keterlibatan sektor swasta serta perencanaan pengembangan masyarakat yang mengedepankan interaksi dan partisipasi transmigrasi dan penduduk sekitarnya.

Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui pemberdayaan ekonomi desa dan penyediaan lapangan kerja baru diarahkan pada optimalisasi pengelolaan komoditas unggulan daerah dengan intervensi modal dan teknologi, baik dari sumbangan pemerintah maupun dunia usaha. Selain itu sistem

ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

3. RPJM ke-3 (2016-2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 diarahkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan penekanan pada peningkatan daya saing daerah dalam percaturan ekonomi dan politik global. Pada fase RPJM ke-3 ini kesejahteraan rakyat Kota Tidore Kepulauan semakin meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga mengalami peningkatan signifikan dimana hampir 40 persen penduduk Kota Tidore Kepulauan telah menamatkan pendidikan SMU dan sederajatnya serta 35 persen telah menamatkan pendidikan tinggi. Perkembangan ini diikuti dengan semakin meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, penduduk yang tumbuh seimbang dan mantapnya karakter sosial.

Mantapnya stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dan daerah didukung oleh kesiapan personel TNI/Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas dan keutuhan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung, baik menyangkut hubungan konsultatif dengan pihak legislatif daerah maupun dengan kelompok-kelompok sosial yang ada.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin maju melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta disertai partisipasi aktif masyarakat.

Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan SDA tropis lainnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis dan daya saing daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang telah ada serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Daya saing perekonomian Kota Tidore Kepulauan semakin kuat dan kompetitif dalam konteks lokal dan regional dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan. Pada periode ini infrastruktur sosial

dan ekonomi menjadi semakin berkembang pesat didukung oleh mantapnya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Dunia pendidikan pun semakin berkembang yang ditandai dengan jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan industrial yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya alam daerah.

4. RPJM ke-4 (2021-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, pembangunan kesejahteraan sosial pada periode RPJM ke-4 ditujukan bagi peningkatan prosentasi tamatan Perguruan Tinggi yang memiliki kecakapan, ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia yang dibutuhkan pembangunan daerah. Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta ketersediaan sumberdaya pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan, peningkatan taraf gizi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan di desa dan kota merupakan prasarat meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang lebih baik.

Struktur perekonomian semakin maju yang ditandai dengan keterpaduan industri pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya serta berkembangnya sektor jasa. Masyarakat memiliki akses modal perbankan dengan bunga

kredit yang murah serta berkembangnya penyertaan modal sektor swasta dalam pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2026 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah yang berpendapatan menengah dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang minim.

Kondisi maju dan mandiri di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya menjadi lebih nyata dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek, terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, penegakan hukum yang persuasif serta terciptanya kedamaian dan kerukunan hidup yang dilandasi semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Citra Kota Tidore Kepulauan sebagai kota budaya tercipta melalui keramahan dan tata perilaku sosial masyarakat terhadap setiap tamu daerah dan wisatawan yang datang ke Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 ini disusun guna menjamin konsistensi dan keterkaitan antara rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk kurun waktu 20 Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan sebuah produk hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan Instansi Terkait lainnya serta masyarakat termasuk Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk mempedomani Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan 2005-2025.

2. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan disetiap periode kepemimpinan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan untuk kurun waktu 5 tahun dengan mengacu kepada Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota Terpilih.

3. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Dokumen Perencanaan lainnya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 merupakan rencana makro yang bersifat fleksibel, oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 tidak mengesampingkan kebijakan-kebiakan lainnya yang bersifat *top-down* dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan jika selama tahun rencana berjalan terjadi hal-hal yang menuntut untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan terhadap rencana ini, maka RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 ini dapat direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 yang memuat Kondisi Umum dan Permasalahan Daerah, Visi, Misi dan Indikator Kinerja, Sasaran, Arah dan Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025, yang merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 20 tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan memberikan arah dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keberhasilan pembangunan Kota Tidore Kepulauan merupakan perwujudan dari Visi Kota Tidore Kepulauan Yang Maju, Mandiri dan Berperadaban yang harus didukung oleh: 1) Komitmen dari Kepemimpinan Pemerintah Kota yang kuat dan demokratis; 2) Konsisten dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota; 3) Keberpihakan kepada masyarakat; 4) Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.